



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN  
DAN  
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
(DINAS PMD)**

**KABUPATEN CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**Jalan SunanMuria No.20 Telp. / Fax. (0231) 321710**  
**S U M B E R**

---

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN CIREBON

Nomor : 050/ 2672/DINAS PMD/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa penetapan IKU Perubahan harus sejalan dengan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon yang telah dilakukan *Focus Group Discussion* di Internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon yang kemudian diasistensi, direview dan dievaluasi oleh Bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 1, Seri D);

5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Seri D);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 45 Tahun 2021 Seri D).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;

- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Cirebon melalui Bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber  
Pada tanggal : 22 November 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN CIREBON



Drs. ERUS RUSMANA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690716 199006 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 050/ 2672 /DINAS PMD/2021

TANGGAL : 22 NOVEMBER 2021

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Status Kemajuan Kemandirian Desa	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	2 Desa	5 Desa	28 Desa	49 Desa	70 Desa	91 Desa	91 Desa
1.1	Meningkatnya Indek Ketahanan Sosial Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0.81 Poin	0.81	0.84	0	0	0	0.84 Poin
1.2	Meningkatnya Indek Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.78 Poin	0.84	0.85	0	0	0	0.85 Poin
1.3	Meningkatnya Indek Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.78 Poin	0.78	0.80	0	0	0	0.80 Poin
1.4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0	3.55	3.55	3.56	3.57	3.58	3.58 poin
1.5	Meningkatnya Status rata-rata Indeks Desa Membangun	Nilai Status Indeks Desa Membangun	0	0	0.72	0.73	0.74	0.75	0.75 Poin

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET					KONDI AKHIR
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.6	Meningkatnya jumlah desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa	Meningkatnya Persentase Jumlah Desa Yang Memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDesa	0	0	20	40	55	70	70 %

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN CIREBON



Drs. ERUS RUSMANA, M.Si  
Pembina Utama Muda

NIP. 19690716 199006 1 001

# BAB I. PENDAHULUAN

## A. VISI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupaya untuk secara proaktif dan antisipatif menetapkan langkah-langkah strategis dengan memanfaatkan berbagai peluang dan potensi dimiliki oleh masyarakat, yang didukung oleh kesungguhan aparatur pemerintah dilingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Cirebon guna mencapai visi Kabupaten Cirebon.

Agar dapat bersinergis dengan visi Kabupaten Cirebon, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon menetapkan visi yakni **TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN.**

## B. MISI

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, maka telah ditentukan misi yang jelas sebagai pernyataan guna mencapai tujuan sasaran yang diharapkan. Dalam menetapkan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, menyesuaikan dengan visi tersebut di atas, juga dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon itu sendiri dengan melihat Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), dengan demikian maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon menetapkan Misi yaitu : **MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS MASYARAKAT UNTUK LEBIH MAJU DAN UNGGUL SEHINGGA MENAMBAH DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL, NASIONAL DAN REGIONAL, YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH**



**C. TUJUAN**

Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa

**D. SASARAN**

- 1) Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa;
- 2) Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa;
- 3) Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa;
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD.
- 5) Meningkatnya Status rata-rata Indeks Desa Membangun;
- 6) Meningkatnya jumlah desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa.

**E. INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS  
(INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN)**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Penjelasan (Formulasi)</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Sumber Data</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa	Meningkatnya jumlah desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri 28 Desa Mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Renstra
2	Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Nilai Indeks Ketahanan Sosial (IKS) 0,84 poin	Bidang Sosial, Budaya dan Kelembagaan Masyarakat	Pelaporan Bidang, Desa
3	Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Nilai Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) 0,85 poin	Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan	Pelaporan Bidang, Desa
4	Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	Nilai Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) 0,80 poin	Bidang Pemerintahan Desa	Pelaporan Bidang, Desa
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Total Nilai Persepsi Per Unsur / Total Unsur yang terisi x Nilai Penimbang 3,55 poin	Sekretariat	Hasil Kuisoner
5	Meningkatnya Status rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai Status Indeks Desa Membangun	Jumlah nilai IDM se-kabupaten Cirebon : Jumlah Desa 0.72 Poin	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pelaporan Bidang, Desa
6	Meningkatnya Jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa	Meningkatnya persentase jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDes	(Jumlah Desa yang menganggarkan PADesa di APBDes : Jumlah Desa se Kabupaten Cirebon) x 100 %	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	Pelaporan Bidang, Desa

## RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN TAHUN 2021

1	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa	Indek Ketahanan Sosial (IKS)	0,84 Poin	100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1 <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	<b>433.937.180</b>	Bidang Sosial, Budaya dan Kelembagaan Masyarakat
					PROGRAM PENATAAN DESA	1 <b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b> 1) Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 2) Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	<b>88.483.000</b>	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
					PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	1 <b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b> 1) Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota 2) Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	<b>7.718.400</b>	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1 <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b> 1) Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	<b>40.776.500</b>	Bidang Pemerintahan Desa
2	Meningkatnya Indek Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,85 Poin	100%	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1 <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b> 1) Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa 2) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	<b>4.556.106.193</b>	Bidang Pemerintahan Desa

						1	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>9.282.000</b>	Bidang Sosial, Budaya dan Kelembagaan Masyarakat
						1)	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		
						2)	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
3	Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,80 Poin	100%	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>660.955.200</b>	Bidang Pemerintahan Desa
						1)	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
						2)	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		
						3)	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,55 Poin	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>56.217.500</b>	Sekretariat
						1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
						2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
						3)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
						2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.732.063.500</b>	
						1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
						2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
						3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		

						1	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>30,391,500</b>	
						1)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
						1	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>249.032.200</b>	
						1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
						2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
						3)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
						4)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
						5)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
						6)	Penyediaan Bahan/Material		
						7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
						1	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>151,919,028</b>	
						1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
						2)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
						1	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>326,167,000</b>	
						1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
						2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
5	Meningkatnya Status rata-rata Indeks Desa Membangun	Nilai Status Indeks Desa Membangun	0.72	100 %	PROGRAM PENATAAN DESA	1	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>129.198.900</b>	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
						1)	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa		
						2)	Fasilitasi Sarana Prasarana Desa		

					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)	<b>Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Daerah</b> Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	<b>2.050.915.931</b>	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1 1) 2) 3)	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	<b>502.480.350</b>	Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat

						4)	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		
6	Meningkatnya Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa	Meningkatnya persentase jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDesa	20%	100%	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	1	<b>Fasilitasi Kerjasama antar Desa</b> 1) Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota 2) Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	<b>294.512.900</b>	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

## **F. KEBIJAKAN**

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada visi, misi, sasaran, tujuan, yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

- 1) Mengsinergikan perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Pengembangan ekonomi desa yang menitikberatkan pada pengembangan dan peningkatan strata Bumdes serta pemanfaatan potensi desa, peningkatan produktivitas, pembukaan lapangan kerja, serta kesejahteraan warga;
- 3) Mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD untuk mengawal proses perencanaan pembangunan didesa;
- 4) Mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD untuk membentuk dan meningkatkan Kerjasama Antar Desa;
- 5) Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai upaya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat.



## G. PROGRAM DAN KEGIATAN

### DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TA. 2021

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2	13				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				14.272.718.382	47,438,900		0	14.320.157.282	
2	13	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				5.498.351.828	47,438,900			5.545.790.728	
2	13	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				56,217,500				56,217,500	
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.999.300				29.999.300	
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.137.800				9.137.800	
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.080.400				17.080.400	
2	13	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				4.732.063.500				4.732.063.500	
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.714.975.000				4.714.975.000	
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8.559.600				8.559.600	
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8.528.900				8.528.900	
2	13	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				30.391.500				30.391.500	
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30.391.500				30.391.500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
2	13	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				201.593.300	47.438.900				249.032.200	
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.194.400					9.194.400	
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			47.438.900				47.438.900	
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28.380.000					28.380.000	
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45.024.600					45.024.600	
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21.510.000					21.510.000	
2	13	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		58.001.800					58.001.800	
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		99.956.500					99.956.500	
2	13	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				151.919.028					151.919.028	
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		115.199.028					115.199.028	
2	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		36.720.000					36.720.000	
2	13	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				326.167.000					326.167.000	
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		105.325.000					105.325.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.150.000				9.150.000	
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		211.692.000				211.692.000	
2	13	02			<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>				<b>217.681.900</b>				<b>217.681.900</b>	
2	13	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>				<b>217.681.900</b>				<b>217.681.900</b>	
2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon,		58.592.600				58.592.600	
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		88.483.000				88.483.000	
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		70.606.300				70.606.300	
2	13	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>				<b>302.231.300</b>				<b>302.231.300</b>	
2	13	03	2.01		<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>				<b>302.231.300</b>				<b>302.231.300</b>	
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.718.400				7.718.400	
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	DTU-DAU, Bankeu Prov	Kab. Cirebon		294.512.900				294.512.900	
2	13	04			<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>				<b>7.308.753.824</b>				<b>7.308.753.824</b>	
2	13	04	2.01		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>				<b>7.308.753.824</b>				<b>7.308.753.824</b>	
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon		431.701.600				431.701.600	
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon		37.142.200				37.142.200	
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon		16.119.500				19.119.500	
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon		4.584.830.593				4.584.830.593	
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon		1.516.777.031				1.516.777.031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon,		40.776.500				40.776.500	
2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon,		24.425.000				24.425.000	
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon,		6.097.000				6.097.000	
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon,		142.816.200				142.816.200	
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon,		84.609.300				84.609.300	
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon,		308.795.500				308.795.500	
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon,		109.822.900				109.822.900	
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon,		4.840.500				4.840.500	
2	13	05			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>				<b>945.699.530</b>				<b>945.699.530</b>	
2	13	05	2.01		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>945.699.530</b>				<b>945.699.530</b>	
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon		433.937.180				433.937.180	
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon		93.702.000				93.702.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.875.000				7.875.000	
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		132.400.000				132.400.000	
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.407.000				1.407.000	
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		276.378.350				276.378.350	

## BAB II. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

### A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2020

#### a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja utama tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET IKU 2020	REALISASI IKU 2020	%	PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian desa	Meningkatnya jumlah desa Mandiri	Desa tertinggal Tahun 2019 =12 desa. Relisasi desa tertinggal Tahun 2020 = 2 desa. Jadi $12-2 = 10$ $10/2 \times 100\% = 500\%$	Desa	5	7	500%	Semua Program
1	Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,81	Poin	0,81	0,89	109,88%	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
2	Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,84	Poin	0,84	0,84	100%	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
3	Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,78	Poin	0,78	0,72	92,31%	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	80	Poin	80	80	100%	Sekretariat

#### b) Perbandingan antara realisasi kinerja utama serta capaian kinerja utama tahun 2020 dengan tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ Perhitungan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020
1	Meningkatnya jumlah desa Mandiri	$IDM = 1/3 (IKS+IKE+IKL)$	2 Desa	2 Desa	5 Desa	7 Desa
2	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	DESA MANDIRI ( $IDM > 0,8155$ ) DESA MAJU ( $0,8155 \geq IDM > 0,7072$ ) DESA BERKEMBANG ( $0,7072 \geq IDM > 0,5989$ ) DESA TERTINGGAL ( $0,5989 \geq IDM > 0,4907$ ) DESA SANGAT TERTINGGAL ( $IDM \leq 0,4907$ )	0,81 Poin	0,76 Poin	0,81 Poin	0,89 Poin
3	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	DESA MANDIRI ( $IDM > 0,8155$ ) DESA MAJU ( $0,8155 \geq IDM > 0,7072$ ) DESA BERKEMBANG ( $0,7072 \geq IDM > 0,5989$ ) DESA TERTINGGAL ( $0,5989 \geq IDM > 0,4907$ ) DESA SANGAT TERTINGGAL ( $IDM \leq 0,4907$ )	0,78 Poin	0,61 Poin	0,84 Poin	0,84 Poin

4	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	DESA MANDIRI (IDM > 0,8155) DESA MAJU (0,8155 ≥ IDM > 0,7072 ) DESA BERKEMBANG (0,7072 ≥ IDM > 0,5989) DESA TERTINGGAL (0,5989 ≥ IDM > 0,4907) DESA SANGAT TERTINGGAL (IDM ≤ 0,4907)	0,78 Poin	0.66 Poin	0,78 Poin	0.72 Poin
5	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Bobot nilai rata-rata tertimbang=Jumlah Bobot/Jumlah Unsur	-	-	80 Poin	80 Poin

- c) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RENSTRA)

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Jangka Menengah Dalam RENSTRA	Realisasi Indikator Kinerja Utama Sampai dengan Tahun 2020
1	2	3	4	5
		Meningkatnya jumlah desa Mandiri	5 Desa	7 Desa
1	Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial ( IKS )	0,81 Poin	0.89 Poin
2	Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Ekonomi ( IKE )	0,84 Poin	0.84 Poin
3	Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,78 Poin	0.72 Poin
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	80 Poin	80 Poin

- d) Perbandingan realisasi kinerja utama tahun 2020 dengan standar nasional

Nihil.

- e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Dengan memperhatikan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dan berdasarkan pelaksanaan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah, maka dapat dirumuskan Identifikasi Permasalahan Kinerja berdasarkan Tugas, dan fungsi Dinas sebagai berikut :

<b>Aspek Kajian</b>			<b>Faktor yang mempengaruhi</b>	
---------------------	--	--	---------------------------------	--

	<b>Capaian/Kondisi Saat ini</b>	<b>Standar yang digunakan</b>	<b>Internal (Kewenangan SKPD)</b>	<b>Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)</b>	<b>Permasalahan Pelayanan SKPD</b>
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan  Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tingkat partisipasi unsur lembaga kemasyarakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa belum optimal dalam mendukung perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa	Indikator sasaran Renstra/ RPJMD/IKU	Koordinasi dan komunikasi internal	Lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan	Belum intensifnya koordinasi antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah desa yang berkaitan dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Tingkat kehadiran aparatur pemerintah desa, anggota BPD, tokoh masyarakat dan unsur lembaga kemasyarakatan dalam penyusunan Rancangan Perdes APBDes belum menunjukkan hasil yang optimal	Indikator sasaran Renstra/ RPJMD/IKU	Koordinasi dan komunikasi internal	Lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan	Belum intensifnya koordinasi antara aparatur pemerintah desa, anggota BPD, tokoh masyarakat dan unsur lembaga kemasyarakatan dalam penyusunan Rancangan Perdes APBDes
Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Tingkat Ketahanan ekonomi desa dalam wujud pengembangan Badan Usaha Ekonomi Desa (Bumdes) belum mencapai hasil yang optimal	Indikator sasaran Renstra/ RPJMD/IKU	Koordinasi dan komunikasi internal	Lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) belum mampu menggerakkan ekonomi desa. Ada banyak hal yang perlu dilakukan agar BUMDES yang telah berdiri tersebut bisa aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan masyarakat dalam bentuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari sisi pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu ditingkatkan	Indikator sasaran Renstra/ RPJMD/IKU	Koordinasi dan komunikasi intern	Lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan	Kualitas dan kuantitas aparatur Dinas PMD dalam memberikan pelayanan public belum optimal

#### f) Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal adalah proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur



organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (*weakness*) atau kekuatan (*strength*) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Adapun kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas PMD Kabupaten Cirebon diantaranya, yaitu:

**Kekuatan / *Strengths* (S)**

- 1) Adanya struktur organisasi dan Tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Jumlah sumber daya manusia aparatur memadai;
- 3) Komitmen pimpinan dalam menjalin koordinasi pelaksanaan tugas-tugas terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 4) Komitmen aparatur Dinas PMD dalam memberikan pelayanan administrasi yang optimal.

**Kelemahan / *Weakness* (W)**

- 1) Belum adanya kesesuaian kompetensi individu ASN dengan kompetensi Jabatan;
- 2) Belum terwujudnya manajemen ASN berdasarkan merit sistem;
- 3) Koordinasi intensif lintas bidang dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa belum optimal;
- 4) Dukungan prasarana dan sarana yang belum memadai.

g) Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity*) dan tantangan/ancaman (*threats*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang-peluang dan sekaligus mengingatkan Dinas PMD Kabupaten Cirebon akan timbulnya tantangan/ancaman. Adapun Peluang dan Tantangan yang dihadapi Dinas PMD Kabupaten Cirebon, diantaranya yaitu:

### **Peluang/ Opportunity (O)**

- 1) Adanya kegiatan pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan pembangunan desa;
- 2) Adanya kegiatan pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kapasitas pengelola/pengurus Bumdes dan pengembangan lembaga ekonomi masyarakat lainnya;
- 3) Adanya kegiatan pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan desa;
- 4) Adanya pembinaan dan pelatihan teknis administrasi kepegawaian dan perkantoran sebagai upaya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

### **Ancaman/ Threats (T)**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas PMD Kabupaten Cirebon tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain:

- 1) Penyusunan rancangan aksi terkait pembangunan desa belum mencakup penguatan perencanaan partisipatif dari lembaga kemasyarakatan yang bertumpu pada pendayagunaan aset dan sumberdaya lokal. Dalam konstruksi pelaksanaan pembangunan desa, perencanaan partisipatif dari lembaga kemasyarakatan menjadi kunci utama untuk mendorong perumuskan kepentingan kolektif di desa yang berorientasi pada pendayagunaan sumberdaya lokal desa;
- 2) Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) belum mampu menggerakkan ekonomi desa. Ada banyak hal yang perlu dilakukan agar BUMDES yang telah berdiri tersebut bisa aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, bukan hanya sekadar papan nama;
- 3) Belum optimalnya kinerja aparatur pemerintah desa terkait dengan perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan desa ;
- 4) Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM).

<b>FAKTOR INTERNAL</b>	<b>STRENGTH (KEKUATAN)</b>	<b>WEAKNESS (KELEMAHAN)</b>
	Adanya struktur organisasi dan Tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas	Belum adanya kesesuaian kompetensi individu ASN dengan kompetensi Jabatan

<b>FAKTOR EKSTERNAL</b>	Jumlah sumber daya manusia aparatur memadai	Belum terwujudnya manajemen ASN berdasarkan merit sistem
	Komitmen pimpinan dalam menjalin koordinasi pelaksanaan tugas-tugas terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Koordinasi intensif lintas bidang dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa belum optimal
	Komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan administrasi yang optimal	Dukungan prasarana dan sarana yang belum memadai
<b>OPPORTUNITY (PELUANG)</b>	<b>STRATEGI (SO)</b>	<b>STRATEGI (WO)</b>
Adanya kegiatan pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan pembangunan desa	Meningkatkan peran serta aktif aparatur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes)	Perlu adanya kesesuaian kompetensi pejabat terkait agar mampu mengsinergikan perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah
Adanya kegiatan pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kapasitas pengelola/pengurus Bumdes dan pengembangan lembaga ekonomi masyarakat lainnya	Meningkatkan ketahanan ekonomi desa melalui pengembangan ekonomi lokal di desa terutama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), karena hal ini terkait dengan program unggulan Kabupaten Cirebon yaitu Bumdes Berdaya	Dibutuhkan kapasitas pejabat yang kompeten serta koordinasi intensif dengan tenaga ahli serta pendamping desa dalam memberdayakan ekonomi desa yang menitikberatkan pada pengembangan dan peningkatan strata Bumdes serta pemanfaatan potensi desa, peningkatan produktivitas, pembukaan lapangan kerja, serta kesejahteraan warga
Adanya kegiatan pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan desa	Meningkatkan peran serta aktif aparatur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes)	Perlu mengsinergikan kegiatan-kegiatan lintas bidang yang ada di DPMD untuk mengawal proses perencanaan pembangunan di desa
Adanya pembinaan dan pelatihan teknis administrasi kepegawaian dan perkantoran sebagai upaya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat	Dibutuhkan dukungan prasarana dan sarana yang memadai untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai upaya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat
<b>THREAT (ANCAMAN)</b>	<b>STRATEGI (ST)</b>	<b>STRATEGI (WT)</b>
Penyusunan rancangan aksi terkait pembangunan desa belum mencakup penguatan perencanaan partisipatif dari lembaga kemasyarakatan yang bertumpu pada pendayagunaan aset dan sumberdaya lokal. Dalam konstruksi pelaksanaan pembangunan desa, perencanaan partisipatif dari lembaga kemasyarakatan menjadi kunci utama untuk mendorong perumuskan kepentingan kolektif di desa yang berorientasi pada pendayagunaan sumberdaya lokal desa	Membutuhkan koordinasi antara pemangku tugas di tiap bidang untuk mengawal dan membina penyusunan rancangan aksi terkait pembangunan desa sebagai upaya penguatan perencanaan partisipatif dari lembaga kemasyarakatan.	Perlu adanya kesesuaian kompetensi pejabat terkait agar mampu membina penyusunan rancangan aksi terkait pembangunan desa sebagai upaya penguatan perencanaan partisipatif dari lembaga kemasyarakatan dengan tujuan mengsinergikan perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pendayagunaan sumberdaya lokal desa

<p>Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) belum mampu menggerakkan ekonomi desa. Ada banyak hal yang perlu dilakukan agar BUMDES yang telah berdiri tersebut bisa aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, bukan hanya sekedar papan nama</p>	<p>Diperlukan upaya konkrit dari pemangku tugas terkait untuk meningkatkan peran aktif Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) agar mampu menggerakkan ekonomi desa dan terlaksananya peningkatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat</p>	<p>Dibutuhkan peran aktif pejabat yang memiliki kompetensi terkait serta koordinasi intensif dengan tenaga ahli Bumdes serta pendamping desa dalam memberdayakan ekonomi desa yang menitikberatkan pada pengembangan dan peningkatan strata Bumdes serta pemanfaatan potensi desa, peningkatan produktivitas, pembukaan lapangan kerja, serta kesejahteraan warga</p>
<p>Belum optimalnya kinerja aparatur pemerintah desa terkait dengan perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan desa</p>	<p>Mebutuhkan pengawalan dan pembinaan intensif dari pemangku tugas di DPMD dalam hal peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa terkait dengan perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan desa</p>	<p>Diperlukan sinergitas lintas sektoral terkait kegiatan-kegiatan yang ada di DPMD untuk mengawal proses perencanaan pembangunan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan desa</p>
<p>Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</p>	<p>Perlu adanya optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</p>	<p>Dibutuhkan kelengkapan prasarana dan sarana yang memadai untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai upaya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</p>

## B. Realisasi Anggaran Tahun 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		SISA DALAM DPA	
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6,427,945,664</b>	<b>6,005,595,885</b>	93.43	<b>422,349,779</b>	6.57
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3,961,464,000</b>	<b>3,893,698,423</b>	98.29	<b>67,765,577</b>	1.71
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2,466,481,664</b>	<b>2,111,897,462</b>	85.62	<b>354,524,202</b>	14.37
<b>1</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>366,106,400</b>	<b>311,098,798</b>	84.97	<b>55,007,602</b>	15.03
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	127,599,600	81,335,016	63.74	46,264,584	36.26
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	9,195,000	7,287,500	79.26	1,907,500	20.74
	Penyediaan alat tulis kantor	23,198,600	23,198,600	100.00	-	-
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16,706,400	16,706,400	100.00	-	-
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	2,262,800	2,262,800	100.00	-	-
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	94,400,000	94,150,000	99.74	250,000	0.26
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15,440,000	15,190,000	98.38	250,000	1.62
	Penyediaan makanan dan minuman	19,770,000	19,770,000	100.00	-	-
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	57,534,000	51,198,482	88.99	6,335,518	11.01
<b>2</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>394,773,600</b>	<b>380,211,800</b>	96.31	<b>14,561,800</b>	3.69
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	183,920,600	174,459,800	94.86	9,460,800	5.14
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	9,500,000	9,500,000	100.00	-	-
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	94,248,000	89,397,000	94.85	4,851,000	5.15
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9,370,000	9,370,000	100.00	-	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	97,735,000	97,485,000	99.74	250,000	0.26
<b>3</b>	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>6,419,000</b>	<b>6,419,000</b>	100.00	-	-
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	450,000	450,000	100.00	-	-
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	450,000	450,000	100.00	-	-
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3,869,000	3,869,000	100.00	-	-
	Penyusunan pelaporan capaian program dan kegiatan triwulan	450,000	450,000	100.00	-	-
	Penyusunan laporan tahunan dinas	450,000	450,000	100.00	-	-
	Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas	750,000	750,000	100.00	-	-

<b>4</b>	<b>Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor</b>	<b>13,411,000</b>	<b>13,411,000</b>	100.00	-	-
	Penyusunan dokumen perencanaan sektoral	13,111,000	13,111,000	100.00	-	-
	Penyusunan pembuatan profil dinas/badan	300,000	300,000	100.00	-	-
<b>5</b>	<b>Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>	<b>822,215,500</b>	<b>547,828,660</b>	66.63	<b>274,386,840</b>	33.37
	Fasilitasi Penguatan TP. PKK	353,142,400	248,224,840	70.29	104,917,560	29.71
	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Pokjanal Posyandu	55,646,600	54,647,820	98.21	998,780	1.79
	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	0	-	-	-	-
	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat	151,005,500	76,320,000	50.54	74,685,500	49.46
	Pelatihan P3MD	108,871,000	58,021,000	53.29	50,850,000	46.71
	Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi RT / RW	64,921,000	49,771,000	76.66	15,150,000	23.34
	Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi LPMD/K	88,629,000	60,844,000	68.65	27,785,000	31.35
<b>6</b>	<b>Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>	<b>63,506,800</b>	<b>62,955,800</b>	99.13	<b>551,000</b>	0.87
	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	34,986,800	34,935,800	99.85	51,000	0.15
	Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional	0	-	-	-	-
	Pelestarian Aset dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Program PNPM-MPd	28,520,000	28,020,000	98.25	500,000	1.75
<b>7</b>	<b>Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>	<b>189,777,100</b>	<b>184,578,140</b>	97.26	<b>5,138,960</b>	2.71
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	61,426,500	61,366,500	99.90	60,000	0.10
	Fasilitasi TMMD dan TMSS	110,471,600	105,332,640	95.35	5,138,960	4.65
	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	7,799,500	7,799,500	100.00	-	-
	Fasilitasi Pembentukan Kawasan Perdesaan dan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)	10,079,500	10,079,500	100.00	-	-
<b>8</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	<b>610,272,264</b>	<b>605,394,264</b>	99.20	<b>4,878,000</b>	0.80
	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	52,843,800	52,774,800	99.87	69,000	0.13
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	82,311,600	82,242,600	99.92	69,000	0.08
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	98,552,400	98,552,400	100.00	-	-
	Penguatan Kapasitas Penyelenggara Pemerintah desa	376,564,464	371,824,464	98.74	4,740,000	1.26

### BAB III. PERENCANAAN KINERJA UTAMA PERUBAHAN TAHUN 2021

1	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa	Indek Ketahanan Sosial (IKS)	0,84 Poin	100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1) <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	<b>433.937.180</b>	Bidang Sosial, Budaya dan Kelembagaan Masyarakat
					PROGRAM PENATAAN DESA	1) <b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b> 1) Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 2) Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	<b>88.483.000</b>	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
					PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	1) <b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b> 1) Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota 2) Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	<b>7.718.400</b>	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1) <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b> 1) Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	<b>40.776.500</b>	Bidang Pemerintahan Desa
2	Meningkatnya Indek Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,85 Poin	100%	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1) <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b> 1) Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa 2) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	<b>4.556.106.193</b>	Bidang Pemerintahan Desa

						1	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>9.282.000</b>	Bidang Sosial, Budaya dan Kelembagaan Masyarakat
						1)	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		
						2)	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
3	Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,80 Poin	100%	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>660.955.200</b>	Bidang Pemerintahan Desa
						1)	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
						2)	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		
						3)	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,55 Poin	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>56.217.500</b>	Sekretariat
						1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
						2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
						3)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
						2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.732.063.500</b>	
						1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
						2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
						3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		



						1	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>30,391,500</b>	
						1)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
						1	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>249.032.200</b>	
						1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
						2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
						3)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
						4)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
						5)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
						6)	Penyediaan Bahan/Material		
						7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
						1	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>151,919,028</b>	
						1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
						2)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
						1	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>326,167,000</b>	
						1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
						2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
5	Meningkatnya Status rata-rata Indeks Desa Membangun	Nilai Status Indeks Desa Membangun	0.72	100 %	PROGRAM PENATAAN DESA	1	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>129.198.900</b>	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
						1)	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa		
						2)	Fasilitasi Sarana Prasarana Desa		

					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)	<b>Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Daerah</b> Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	<b>2.050.915.931</b>	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1 1) 2) 3)	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	<b>502.480.350</b>	Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat

						4)	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		
6	Meningkatnya Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa	Meningkatnya persentase jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDesa	20%	100%	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	1	<b>Fasilitasi Kerjasama antar Desa</b> 1) Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota 2) Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	<b>294.512.900</b>	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa





No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sedikit	Banyak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
L.1.1.14	PROGRAM KONSOLIDASI PEMBENTUKAN DESA	0,00	2.054.915.914,00	Sumber Dana: DTKD-DBP
L.1.1.15	PROGRAM PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ASUK DAN MASYARAKAT RUMAH AGAT	0,00	562.482.311,00	Sumber Dana: DTKD-DBP
L.1.1.11	PROGRAM PEMBENTUKAN BANGUNAN DESA	0,00	394.111.461,00	Sumber Dana: Bantuan Pmn, DTKD-DBP
	J U M L A H	0.000.000,00	3.011.509.686,00	

Di Atas Sudah  
BUPATI CIBINONG

Drs. B. BUDON M.P.A.

Sumber: November 2011  
Hutan Sibinong  
Kopiah Di Atas Pembentukan Masyarakat dan Desa.

Drs. LUIS BUSUMAMA, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630216 196506 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. DEDI SUDARMAN, SH.,MM.  
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, November 2021

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

**Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NP. 19690716 199006 1 001

**H. DEDI SUDARMAN, SH.,MM.**  
Pembina  
NP. 19750903 200604 1 014







Sumber, November 2023  
Pusat Kemitraan  
Kerjasama Dengan Pemda/Bupati/Walikota/Provinsi dan Desa

**BL. BADI SUDARMAN, S.H., M.H.K.**  
Perencana  
NIP. 19710903 200610 1 014

Siwa Utami  
Kerjasama Dengan Pemda/Bupati/Walikota/Provinsi dan Desa

**Drs. EDUS RUSMANA, M.Si.**  
Perencana/Bupati/Walikota  
NIP. 19610817 198105 1 001

---

UIN-PPG-PTK-PPG-PAIKER-2023  
Kampus 1, Cikarang - 40132





LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
DINAS PEMERIKSAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PEMERINTAH KABUPATEN CIRIBON

No	Tipe	Indikator Kinerja (Output / Benefit)	Materi Kinerja (Output / Benefit)	Pembinaan			Target Kinerja			
				Keempat	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam		
No	Program	Indikator Kinerja (Output / Benefit)	Materi Kinerja (Output / Benefit)	Pembinaan		Target Kinerja		Anggaran (Rp.)		Kategori
				Keempat	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam	
1.1	PROGAM PENGALIHAN DESA KEKAWASAN RUSTHA	Desa yang telah pindah ke kawasan Rustha	Desa yang telah pindah ke kawasan Rustha	Keempat	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam
1.1.1	PROGAM PENGALIHAN DESA KEKAWASAN RUSTHA	Desa yang telah pindah ke kawasan Rustha	Desa yang telah pindah ke kawasan Rustha	Keempat	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam
1.1.2	PROGAM PENGALIHAN DESA KEKAWASAN RUSTHA	Desa yang telah pindah ke kawasan Rustha	Desa yang telah pindah ke kawasan Rustha	Keempat	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam
1.1.3	PROGAM PENGALIHAN DESA KEKAWASAN RUSTHA	Desa yang telah pindah ke kawasan Rustha	Desa yang telah pindah ke kawasan Rustha	Keempat	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam
1.2	PROGAM PENGALIHAN DESA KEKAWASAN RUSTHA	Desa yang telah pindah ke kawasan Rustha	Desa yang telah pindah ke kawasan Rustha	Keempat	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam
1.2.1	PROGAM PENGALIHAN DESA KEKAWASAN RUSTHA	Desa yang telah pindah ke kawasan Rustha	Desa yang telah pindah ke kawasan Rustha	Keempat	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam
1.2.2	PROGAM PENGALIHAN DESA KEKAWASAN RUSTHA	Desa yang telah pindah ke kawasan Rustha	Desa yang telah pindah ke kawasan Rustha	Keempat	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam
1.2.3	PROGAM PENGALIHAN DESA KEKAWASAN RUSTHA	Desa yang telah pindah ke kawasan Rustha	Desa yang telah pindah ke kawasan Rustha	Keempat	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam
1.3	PROGAM PENGALIHAN DESA KEKAWASAN RUSTHA	Desa yang telah pindah ke kawasan Rustha	Desa yang telah pindah ke kawasan Rustha	Keempat	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam
1.3.1	PROGAM PENGALIHAN DESA KEKAWASAN RUSTHA	Desa yang telah pindah ke kawasan Rustha	Desa yang telah pindah ke kawasan Rustha	Keempat	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam
1.3.2	PROGAM PENGALIHAN DESA KEKAWASAN RUSTHA	Desa yang telah pindah ke kawasan Rustha	Desa yang telah pindah ke kawasan Rustha	Keempat	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam
1.3.3	PROGAM PENGALIHAN DESA KEKAWASAN RUSTHA	Desa yang telah pindah ke kawasan Rustha	Desa yang telah pindah ke kawasan Rustha	Keempat	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam	Keenam
				<b>Jumlah</b>		<b>Jumlah</b>		<b>Jumlah</b>		<b>Kategori</b>
				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00

Fitriati Eka  
Kendala Dinas Pendidikan Masyarakat dan Desa



**Drs. ERUP HIDRANA, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630716 195016 1 001

Sumber, November 2021  
Phua Kusala  
Kendala Dinas Pendidikan Masyarakat dan Desa  
Desa dan Uraan Ekonomi Masyarakat



**Drs. M. BUCHAYATI, M.Si.**  
Pembina TLI  
NIP. 19641218 199801 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADITYA ARIEF MAULANA, S.STP.  
Jabatan : Kepala Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, November 2021

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

**Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691718 199006 1 001

**ADITYA ARIEF MAULANA, S.STP.**  
Penata Tk.1  
NIP. 19830429 200112 1 002



LAMBIAN PENJANGKIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021  
DINAS PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tipean / Luasan Strategis	Indikator Kinerja (Impact) / Numerik	Perhitungan		Sumber Data		Target Kinerja	
			Formula	Tipe	Subjek	Target	Subjek	Target
1.1	Meningkatkan kinerja pelayanan publik dari masyarakat desa	Meningkatnya jumlah desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri di Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri
1.1.1	Meningkatnya tingkat ketertarikan masyarakat desa	Desa Mandiri dan Desa Mandiri	Mula Kala Kabupaten - Sosial	Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri
1.1.2	Meningkatnya tingkat ketertarikan masyarakat desa	Desa Mandiri dan Desa Mandiri	Desa Mandiri dan Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri
1.1.3	Meningkatnya tingkat ketertarikan masyarakat desa	Desa Mandiri dan Desa Mandiri	Desa Mandiri dan Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri
1.1.4	Meningkatnya tingkat ketertarikan masyarakat desa	Desa Mandiri dan Desa Mandiri	Desa Mandiri dan Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	Perhitungan		Sumber Data		Target Kinerja		Kategori
			Formula	Tipe	Subjek	Target	Subjek	Target	
1.1.1.1	Meningkatnya tingkat ketertarikan masyarakat desa	Desa Mandiri dan Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri dan Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri
1.1.1.2	Meningkatnya tingkat ketertarikan masyarakat desa	Desa Mandiri dan Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri dan Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri
1.1.1.3	Meningkatnya tingkat ketertarikan masyarakat desa	Desa Mandiri dan Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri dan Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri
1.1.1.4	Meningkatnya tingkat ketertarikan masyarakat desa	Desa Mandiri dan Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri dan Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri	Desa Mandiri





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAMBASI MUKSIN, SH, M.H.**  
Jabatan : **Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa**

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.**  
Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690710 199006 1 001

Sumber: November 2021

Pihak Kesatu,

**SAMBASI MUKSIN, SH, M.H.**  
Pembina  
NIP. 19640310 199503 1 002



LAMPIRAN PEJAJAH KEMERJA PERUBAHAN TAHUN 2021  
DINAS PEMERIKSAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PEMERINTAH KABUPATEN CIBINONG



No.	Tugas / Kegiatan / Strategi	Indikator Kinerja (Output / Benefit)	Pencapaian		Tipe	Target		Sumber Daya		Output Kinerja
			Berkas	Nilai		Sub	Target	Sub	Target	
L.L.	Mengembangkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Kabupaten	Meningkatkan jumlah Desa yang memiliki SMM	10	100%	Non-Finansial	100%	100%	100%	100%	100%
L.L.I.	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Meningkatkan jumlah Desa yang memiliki pelayanan publik yang baik	10	100%	Non-Finansial	100%	100%	100%	100%	100%
L.L.II.	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Meningkatkan jumlah Desa yang memiliki pelayanan publik yang baik	10	100%	Non-Finansial	100%	100%	100%	100%	100%
L.L.III.	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Meningkatkan jumlah Desa yang memiliki pelayanan publik yang baik	10	100%	Non-Finansial	100%	100%	100%	100%	100%
L.L.IV.	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Meningkatkan jumlah Desa yang memiliki pelayanan publik yang baik	10	100%	Non-Finansial	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Program	Indikator Kinerja (Output / Benefit)	Pencapaian		Tipe	Target		Sumber Daya		Output Kinerja
			Berkas	Nilai		Sub	Target	Sub	Target	
1.1.1.01	PROGRAM PENGUKUTAN DESA	Meningkatkan jumlah Desa yang memiliki pelayanan publik yang baik	10	100%	Non-Finansial	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.1.02	PROGRAM PENGUKUTAN DESA	Meningkatkan jumlah Desa yang memiliki pelayanan publik yang baik	10	100%	Non-Finansial	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.1.03	PROGRAM PENGUKUTAN DESA	Meningkatkan jumlah Desa yang memiliki pelayanan publik yang baik	10	100%	Non-Finansial	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.1.04	PROGRAM PENGUKUTAN DESA	Meningkatkan jumlah Desa yang memiliki pelayanan publik yang baik	10	100%	Non-Finansial	100%	100%	100%	100%	100%

lampiran kedua Perubahan 2021, Output BSK  
tanggal 11/01/2021, ps.18

10/1/2021





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. ANY ALPANY  
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : H. DEDI SUDARMAN, SH.,MM.  
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber: November 2021

Pihak Kedua,

**H. DEDI SUDARMAN, SH.,MM.**  
Pembina  
NIP. 19750903 200604 1 014

Pihak Kesatu,

**Dra. ANY ALPANY**  
Periksa Tk.1  
NIP. 19681120 199303 2 003



No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Tercapainya		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Setelah	Substansi	Sebelum	
(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.4.01.2.01	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang menghasilkan publikasi ilmiah	1 Tahun	1 Tahun	318.031.000,00	318.167.000,00	-
1.1.4.01.2.01.01	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang menghasilkan publikasi ilmiah	1 Tahun	1 Tahun	305.075.000,00	305.075.000,00	Sumber Dana: OTR-DAU
1.1.4.01.2.01.02	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang menghasilkan publikasi ilmiah	1 Tahun	1 Tahun	9.182.000,00	9.182.000,00	Sumber Dana: OTR-DAU
1.1.4.01.2.01.03	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang menghasilkan publikasi ilmiah	1 Tahun	1 Tahun	213.801.000,00	213.801.000,00	Sumber Dana: OTR-DAU
<b>J U M L A H</b>					<b>917.894.738,00</b>	<b>917.894.738,00</b>	

Sambor, November 2021.  
 Pihak Kedua  
 Kepala Subbagas Umum dan Kepegawaian pada  
 Sekretariat

  
**DRS. ARIY SUPRIYANTI**  
 Pejabat  
 NIP. 19651120 199103 2 003

Pihak Kedua  
 Sekretaris Dinas Perencanaan, Manajerial dan Dinkas

  
**N. DRESI SUDARMAN, S.P., M.P.S.**  
 Pejabat  
 NIP. 19750813 200604 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAMALUDIN MALIK, S.H., M.Si.  
Jabatan : Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Sekretariat

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : H. DEDI SUDARMAN, SH.,MM.  
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, November 2021

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

H. DEDI SUDARMAN, SH.,MM.  
Pembina  
NIP. 19750903 200604 1 014

JAMALUDIN MALIK, S.H., M.Si.  
Pembina  
NIP. 19730621 199902 1 001





Sambang, November 2023  
Pusat Kerasu  
Kecamatan Subitripin, Program Baru Kesunggan pada  
Sekretariat,



**JAHALUDIN ABILIK, S.JA., M.SA.**  
Pembina  
NIP. 19730521 199002 1 001

Pusat Kerasu  
Sekretariat Pusat Pembudayaan Masyarakat dan Desa,



**RI, PEGI SUDIRMAN, SH., MHS.**  
Pembina  
NIP. 19710901 200604 1 014







**LAHIRAN PERENCANAAN KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2021  
DINAS PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA  
PEMERINTAH KABUPATEN CIRIBON**

No	Tajuk / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Outcome)	Perhitungan				Sumber Dana	Target Kinerja	
			Unit	Target	Unit	Target			
1.1	Meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat	1.1.1. Meningkatkan jumlah area hijau	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
1.1.1	Meningkatkan jumlah area hijau	1.1.1.1. Meningkatkan jumlah area hijau	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	
1.1.2	Meningkatkan jumlah area hijau	1.1.2.1. Meningkatkan jumlah area hijau	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	
1.1.3	Meningkatkan jumlah area hijau	1.1.3.1. Meningkatkan jumlah area hijau	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Akmoran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Selesai	Realisasi	Selesai	Realisasi	
1.1.1.1	PROGRAM PEMERINTAHAN LEMBAGA KEHASTAMBAHAN, LERASAS AKT DAN MASYARAKAT HUMAN AGRI	1.1.1.1.1. Meningkatkan jumlah area hijau	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1
1.1.2.1.1	Pembinaan Lembaga Kelembagaan yang Berprestasi di Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Adat Tingkat Desa Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Mempunyai Potensi dan Inovasi Adat yang Sama dengan Daerah Kabupaten/Kota	1.1.2.1.1.1. Meningkatkan jumlah area hijau	1.1.2.1.1.1	1.1.2.1.1.1	1.1.2.1.1.1	1.1.2.1.1.1	1.1.2.1.1.1
1.1.3.1.1.1	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Desa Adat	1.1.3.1.1.1.1. Meningkatkan jumlah area hijau	1.1.3.1.1.1.1	1.1.3.1.1.1.1	1.1.3.1.1.1.1	1.1.3.1.1.1.1	1.1.3.1.1.1.1
1.1.3.1.1.2	Pembinaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Desa Adat	1.1.3.1.1.2.1. Meningkatkan jumlah area hijau	1.1.3.1.1.2.1	1.1.3.1.1.2.1	1.1.3.1.1.2.1	1.1.3.1.1.2.1	1.1.3.1.1.2.1
1.1.3.1.1.3	Pembinaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Desa Adat	1.1.3.1.1.3.1. Meningkatkan jumlah area hijau	1.1.3.1.1.3.1	1.1.3.1.1.3.1	1.1.3.1.1.3.1	1.1.3.1.1.3.1	1.1.3.1.1.3.1





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ETI SUGIARTI, SAP,  
Jabatan : Kepala Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Bidang Pemberdayaan  
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Dra. Hj. RUKHYATI, MM,  
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha  
Ekonomi Masyarakat

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, November 2021.

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

**Dra. Hj. RUKHYATI, MM.**  
Perencana Tk.1  
NIP. 19641215 199501 2 001

**ETI SUGIARTI, SAP.**  
Perencana Tk.1  
NIP. 19640225 198903 2 037



No.	ProjeKsi / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Suboutput)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan	
			Subsah	kuantitas	Subsah	Secorok		
1.1.1.01.1.01.01	021 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan yang Berprestasi di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat MulaMula Adat yang Mempunyai Pembinaan MulaMula Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	021 Lembaga Kemasyarakatan yang berprestasi dan mempunyai pembinaan masyarakat	04	03 3 jenis	04	03 8,00	04 379.888.888,00	04
1.1.1.01.1.01.02	020 Peningkatan Kualitas Pelayanan Layanan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (K, WK, PK, Pusat, LW, SW, Karang Taruna, Lembaga Adat Dinas Kelurahan dan Masyarakat MulaMula Adat)	020 Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang baik	04	04 120 orang	04	04	91.792.000,00	Sumber dana: DTK-DAK
1.1.1.01.1.01.03	020 Peningkatan Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	020 Jumlah Desa yang Terlayanan 25 Bina	04	04 10 Desa	04	04	278.378.150,00	Sumber dana: DTK-DAK
<b>J U M L A H</b>						<b>1.008.129.338,00</b>	<b>804.817.838,00</b>	

Sambak, November 2021  
Pihak Kedua  
Kepala Desa/Lembaga Kemasyarakatan Desa/ada  
Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa  
dan Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat

  
**Drs. H. SURENTO, MPA**  
Kendana TLU  
NIP. 19641215 199501 2 001

  
**ETI SUGARTI, SAP**  
Peruka TN  
NIP. 19640225 198903 2 007



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DANI IRAWADI, S.IP, M.Si.**  
jabatan : **Kepala Seksi Penataan Administrasi Pemerintahan Desa pada Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa**

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **ADITYA ARIF MAULANA, S.STP.**  
jabatan : **Kepala Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa**

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, November 2021

Pihak Kedua,

**ADITYA ARIF MAULANA, S.STP.**  
Penata Tk.1  
NIP. 19830429 200112 1 003

Pihak Kesatu,

**DANI IRAWADI, S.IP, M.Si.**  
Pembina  
NIP. 19771010 200501 1 009





LAMPIRAN PERJARAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021  
DINAS PEMERIKSAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tajuk / Rencana Strategis	Indikator Kinerja (Output / Rasio)	Pembangunan			Sumber Dana		Target Kinerja	
			Kuantitas	Unit	Target	Target	Selesai	Selesai	
L.1.	Manajemen dan pengembangan dan pemertanian Desa	Meningkatnya jumlah desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri Desa Mandiri	Desa	Meningkat	Desa	Desa	Desa	
L.1.1.	Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Mula-tamul Ketahanan Ekonomi (IKE)	Desa	Meningkat	Desa	Desa	Desa	
L.1.2.	Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	Mula-tamul Ketahanan Lingkungan (IKL)	Desa	Meningkat	Desa	Desa	Desa	
L.1.3.	Meningkatnya Strategi Desa Mandiri Desa	Mula-tamul Indeks Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri Desa Mandiri	Desa	Meningkat	Desa	Desa	Desa	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Rasio)	Target Kinerja			Anggaran		Keterangan
			Selesai	Selesai	Selesai	Selesai	Selesai	
L.1.2.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERTANIAN DESA							
L.1.2.01.1.	Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Pemerintah Desa dan RT/RW yang melakukan Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat Desa	800 Orang	Desa	800 Orang	875.505.000,00	8.007.000,00	
L.1.2.01.2.	Pembinaan dan Pengembangan Desa Mandiri	Jumlah Desa yang sudah mencapai IKM Desa dan memiliki Desa Mandiri	80 Desa	Desa	80	315.500.000,00	8.004.000,00	Sumber Dana: (750.000)
L.1.2.01.3.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERTANIAN DESA							
L.1.2.01.3.1.	Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Pemerintah Desa dan RT/RW yang melakukan Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat Desa	800 Orang	Desa	800 Orang	875.275.400,00	8.007.000,00	
L.1.2.01.3.2.	Facilitas Pengembangan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kantor yang di tingkatkan	8 Kantor	Desa	8 Kantor	475.700.000,00	431.000.000,00	Sumber Dana: (750.000)
		Jumlah Desa yang di Mandiri	80 Desa	Desa	80 Desa	8.000	8.000	Sumber Dana: (750.000)
		Jumlah Desa yang melakukan peningkatan ekonomi	7 Desa	Desa	7 Desa	8.000	8.000	Sumber Dana: (750.000)
		Jumlah Desa yang melakukan indeks pemertanian (IKM)	80	Desa	80	8.000	8.000	Sumber Dana: (750.000)
L.1.3.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERTANIAN DESA							
						8.000	378.508.400,00	







**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAMSURI, SSTP.  
Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : ADITYA ARIF MAULANA, S.STP.  
Jabatan : Kepala Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**ADITYA ARIF MAULANA, S.STP.**  
Penata Tk.1  
NP. 19030429 200112 1 032

Sumber, November 2021

Pihak Kesatu,

**SAMSURI, SSTP.**  
Penata Tk.1  
NP. 19040319 200212 1 001



No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Outcome)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Substansi (R)	Isu (R)	Substansi (R)	Isu (R)	
1.1.1.1.01.11	Facilitas Perencanaan hasil Desa	Sumber target desa yang relevan awal	(R)	(R)	(R)	(R)	
			Desa	Desa	0,00	0,00	
			10 041 8 01	Desa	330.878.400,00	330.878.400,00	Sumber Dana DTK-DAI

Pihak Kedua  
Kapasitas Desa Administrasi dan Penyelenggaraan Desa,

Sambas, November 2021  
Pihak Ketiga  
Kapasitas Desa Penyelenggaraan Kegiatan dan ABBT Desa  
pada Bidang Kehutanan dan Perencanaan Desa,

  
**ADITYA ARIF MAULANA, S. STP.**  
Perada N.L.  
NIP. 19830413 200112 1 003



**SAMSURI, S. STP.**  
Perada N.L.  
NIP. 19640319 200112 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN CIRIBON  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. UDIN SAMSUDIN, S.Sos., M.Si.  
jabatan : Kepala Seksi Aparatur Pemerintahan Desa pada Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : ADITYA ARIF MAULANA, S.STP.  
jabatan : Kepala Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, November 2021

Pihak Kedua,

**ADITYA ARIF MAULANA, S.STP.**  
Penata TKJ  
NIP. 19830429 200112 1 003

Pihak Kesatu,

**H. UDIN SAMSUDIN, S.Sos., M.Si.**  
Pembina  
NIP. 19730429 199803 1 028

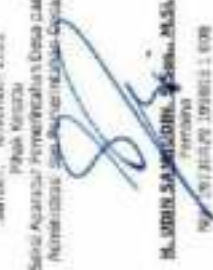


No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Achievement)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Substansi	Kuantitas	Substansi	Secukupnya	
01	01	01	04	01	01	01	01
1.1.1.1.1.01.01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana	Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana	Desa	105 Desa	0.00	308.795.300.00	Serikat Desa (STI)-Desa
			<b>J U M L A H</b>		<b>395.733.900.00</b>	<b>3.489.817.433.00</b>	

Pihak Kedua  
Kepala Desa Kecamatan dan Pemerintah Desa

Sambor, November 2023  
Pihak Kedua  
Kepala Desa Kecamatan dan Kepala Desa

  
**ADITYA ARIF MAHJANI, S.STP.**  
Pemerintah  
NIP. 19820419 200112 1 003

  
**M. UDIN SAIFULDIN, S.Sos., M.Si.**  
Pemerintah  
NIP. 20121209 200803 1 008





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LIES YULIASMURNI, S.Sos, M.Si.  
Jabatan : Kepala Seksi Kerja Sama Desa pada Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : SAMBASI MUKSIN, SH., M.H.  
Jabatan : Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  


**SAMBASI MUKSIN, SH., M.H.**  
Pembina  
NIP. 19640310 199503 1 002

Sumber, November 2021

Pihak Kesatu,  


**LIES YULIASMURNI, S.Sos, M.Si.**  
Pembina  
NIP. 19750615 201701 2 013









**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIO WIBIKSONO, SH, M.SI.  
Jabatan : Kepala Seksi Penataan Desa pada Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : SAMBASI MURSIN, SH, M.H.  
Jabatan : Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**SAMBASI MURSIN, SH, M.H.**  
Pembina  
NIP. 19640310 199503 1 002

Sumber: November 2021

Pihak Kesatu,

**RIO WIBIKSONO, SH, M.SI.**  
Pusatra TK.I  
NIP. 19621231 200902 1 001





## **BAB IV. PENUTUP**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2021 dilingkungan instansi pemerintah khususnya dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja, dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang lebih baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil.

Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.